

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SUATU STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA)

Oleh : Mulyadi Soamole

*P*endapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah. Sumber penerimaan (PAD) yang dimaksud adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan sula dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2009 – 2011 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 80% per tahun. Kontribusi penerimaan (PAD) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, maka Pemda perlu melakukan beberapa langkah di antaranya peningkatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Pendahuluan

Latar Belakang

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administrative pemerintah pusat, propinsi, dan daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian

baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, malalui undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalama wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian. Implikasi lain yang sangat penting dari pengurusan kewenangan tersebut adalah semakin meningkatnya kebutuhan daerah dan pembiayaan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan juga akan semakin besar. Oleh karenanya pemerintah daerah harus dapat bertindak sekaligus bersikap efisien dan efektif serta berprinsip melakukan partnership dengan kelompok-kelompok masyarakat yang potensial. Dengan demikian, peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multipler yang besar.

Dari uraian yang disampaikan diatas bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya yang semakin meningkat.

Penerimaan Kabupaten atau Kota yang tercermin dalam APBD berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Disamping proyek pemerintah pusat dan proyek pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten atau Kota, juga terdapat proyek Kabupaten Kota yang tercermin dalam APBD Kabupaten Kota yang bersangkutan didalamnya terdapat PAD yang bebas dipergunakan oleh Kabupaten Kota tersebut sesuai dengan skala prioritasnya. Bahkan peranan PAD dan APBD Kabupaten Kota dalam pembangunan daerah sangat penting, karena kadang-kadang diperlukan sebagai dana pendamping untuk proyek pusat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo,

dkk (Simanjuntak,2006) yang menyatakan bahwa disisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa kontribusi PAD memberikan peranan yang begitu besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah pemerintah, demikian juga di Kabupaten Kepulauan Sula, untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam berotonomi maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap penyelenggaraan pembangunan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyelenggaraan pembangunan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini selain untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik juga bertujuan antara lain: Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan studi pada Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kepulauan Sula guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data penelitian yang berasal dari:

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui teknik wawancara kepada pegawai bagian keuangan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan obyek yang dipilih.

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain), seperti: Laporan PAD, dan realisasi Laporan APBD Pemerintah Kabupaten Sula Tahun 2009 serta data-data lain yang diperoleh, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan, buku-buku yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian dari Pemerintah kabupaten Sula.

Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau pengcopyan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik data keuangan maupun non keuangan.

Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, digunakan metode yang bersifat deskriptif kuantitatif, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu:

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan melalui wawancara dengan pihak terkait serta dokumen data arsip.

Mengelolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan menggunakan Regresi Linier.

Persamaan Regresi dirumuskan sebagai berikut : $Y' = \alpha + bx$

Dimana :

Y' = subjek variable terikat yang diproyeksikan

X = variable bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan

α = nilai konstanta harga Y jika $X=0$

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variable Y

Menyimpulkan hasil pembahasan sesuai bidang masalah.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003.

Wilayah ini berada di daerah paling selatan Pulau Halmahera. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Sula terletak pada posisi $01^{\circ}4'00''$ LU – $02^{\circ}15'00''$ LU dan $124^{\circ}05'00''$ – $126^{\circ}50'00''$ BT dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Maluku, Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Banda, Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Seram, Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pulau Sulawesi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Penerimaan Pajak Daerah

Untuk melihat sejauh mana penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan perkembangannya, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan target dan realisasi penerimaan serta kenaikan pajak daerah sejak tahun 2009 sampai tahun 2011. pajak daerah dari tahun ke tahun terus meningkat yaitu pada tahun 2009 penerimaan mencapai 87,40% kemudian pada tahun 2010 penerimaan mengalami peningkatan sebesar 91,80% dan Realisasi penerimaan di tahun 2011 sebesar Rp. 96,14%. Setelah melihat perkembangan Target dan realisasi Penerimaan pajak daerah yang terus mengalami peningkatan, namun sebagian besar target yang ingin diperoleh belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh Pajak daerah bukan pajak tetap, dimana tergantung dari kesadaran wajib pajak yang bersangkutan. Penundaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak dan Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak daerah. Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya, target pajak daerah dapat dicapai bahkan lebih karena meningkatnya kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pajak daerah perhotelan, serta adanya penertiban pajak daerah.

Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sehingga retribusi merupakan potensi ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penggalian dan pemanfaatan potensi dari retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan obyek dan subyek retribusi yang ada. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah

Kabupaten Kepulauan Sula dalam mengelola retribusi daerah dan perkembangannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sula, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2009-2011. Retribusi daerah terus mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2009 pertumbuhan retribusi daerah sebesar 43,18% dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 67,31% Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 84,37%.

Penerimaan Laba BUMD

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu penunjang penerimaan Pendapatan Daerah, guna menunjang upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penerimaan laba BUMD di Kabupaten Kepulauan Sula semakin meningkat mulai dari tahun 2009 sebesar Rp. 12,87% mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 17,54% dan pada tahun 2011 sebesar 22,32%. Meningkatnya penerimaan laba disebabkan adanya upaya efektif dan efisien yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula seperti Perusahaan Tripleks Barito Mangoli, Perusahaan Bimoli Sanana dan lembaga-lembaga keuangan serta lembaga atas penyertaan modal.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 realisasi pendapatan asli daerah berkisar 67,83% dari target yang telah ditetapkan, selanjutnya meningkat pada tahun 2010 sebesar 71,16%, kemudian di tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 92,24%. Peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah

di mana daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009-2011.

Besarnya potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Sula, merupakan modal utama bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya alam tersebut, memiliki kegunaan penting bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha maupun stake holder lainnya dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kepulauan sula. Untuk itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan inkam pendapatan daerah yang dapat membantu daerah untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi kabupaten sula. Berikut ini data mengenai Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan tahun pengamatan 2009-2011 untuk pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi sarana pendidikan serta sarana kesehatan. Pengeluaran Pemerintah pada tahun 2009 berkisar 80,2%, pada tahun 2010 sebesar 90,16% dan pada tahun 2011 sebesar 90,2%.

Penutup Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan setelah melakukan uji regresi mengenai hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kepulauan Sula selama periode pengamatan mulai tahun 2009 sampai tahun 2011, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Perkembangan Realisasi pendapatan asli daerah Kepulauan Sula yang terus mengalami peningkatan karena sebagian besar realisasi penerimaan pajak daerah mencapai target yang telah ditetapkan. dan sistem pengelolaan komponen PAD sudah berjalan secara optimal.

Perkembangan dari data yang telah diolah serta hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0.63% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula. Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,02% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula.

Melihat pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula telah menunjukkan kemajuan yang

cukup signifikan karena diimbangi dengan belanja Pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana, di tiap tahun pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dalam membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan tol, mall, sarana hiburan dan lain-lain sehingga mendorong penunjang pendapatan Asli Daerah.

Saran

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula. Berikut ini diajukan beberapa saran yang berkaitan dengan tulisan ini yaitu:

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula lebih khususnya (DIPENDA) agar terus meningkatkan penerimaan pajak disamping itu kuota (DIPENDA) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak sehingga lebih efektif dan efisien.

Diharapkan Kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis penerimaan daerah lainnya guna untuk menambah inkam pendapatan daerah.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana bagi kegiatan perekonomian sebagai penunjang PAD, serta Pajak daerah perlu ditingkatkan secara proposional sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Baswir, Indra, 2005. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. Cet. 1.-.USU Press, Medan.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. 127-146.
- Hartono, Jogiyanto, 2004. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan No 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Saragih, Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU Republik Indonesia, 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-----, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

-----, 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No 1 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku Utara.